



Judul : DPR akan panggil kemendiknas
Tanggal : Rabu, 05 September 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

DPR Akan Panggil Kemendiknas

16 PTN Diduga Lakukan Penyimpangan

JAKARTA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengindikasikan penyimpangan tata kelola keuangan di 16 perguruan tinggi negeri (PTN) dan tiga direktorat di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebesar Rp137,3 miliar.

Anggota BAKN DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, praktik-praktik di PT yang tidak sesuai prinsip *money follows function* (keuangan berdasar peruntukan) ini ditemukan di Universitas Sumatera Utara (USU) sebesar Rp55 miliar, Universitas Airlangga (Unair) sebesar Rp5 miliar, dan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) sebesar Rp4,3 miliar.

Untuk di direktorat Kemendiknas ditemukan di Direktorat Pendidikan Dasar Menengah (Ditdikdasmen) sebesar Rp15 miliar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu Pendidikan sebesar Rp58 miliar. "Temuan BAKN itu dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemendiknas untuk tahun anggaran (TA) 2008, 2009, dan 2010," tukas dia saat diwawancara

wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Eva, LHP BPK ini merupakan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan terkait pengadaan barang dan jasa, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan rekening-rekening terkait di 16 PTN dan tiga direktorat di Kemendiknas.

Dia mengutarakan, atas tinjauan BAKN ini, pihaknya meminta Komisi X DPR memprioritaskan tindak lanjut soal kinerja keuangan di 16 PTN dan tiga direktorat Kemendiknas tersebut. BAKN meminta Komisi X DPR segera menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) agar segera melakukan pembenahan. "Ada tiga area permasalahan yang jadi telaahan BAKN dalam proses penganggaran pengadaan barang dan jasa berupa bentuk-

bentuk kejanggalan, antara lain pagu bukan dari usulan Kemendiknas, penggunaan anggaran untuk kegiatan beda dengan peruntukannya, serta penggunaan PNB yang tidak sesuai keputusan presiden," tegasnya.

Menurut Eva, dalam masalah ini yang perlu dipersoalkan tidak harus selalu Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian, tetapi juga berkaitan dengan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemkeu). Ini terutama dalam hal pencairan dana yang prosesnya secara politik tidak benar atau akuntabel.

Dia melanjutkan, berkaitan dengan telaah BAKN di tingkat perencanaan pengadaan barang dan jasa, ditemukan berbagai kejanggalan antara lain perencanaan yang tidak merujuk kebutuhan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang bersifat proses formal, dan berindikasi terlalu mahal.

"Ini diindikasikan telah melanggar Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan telaahan BAKN di

"Ini diindikasikan telah melanggar Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,"

EVA KUSUMA SUNDARI
Anggota BAKN DPR

tingkat pelaksanaan proyek, ditemukan 16 bentuk kejanggalan yang dipraktikkan oleh 16 PTN," tuturnya.

Hal itu dimulai dengan adanya ketidaksesuaian dengan kontrak di USU, Universitas Mataram (Unram), Universitas Cendrawasih (Uncen), Universitas Haluoleo (Unhalu), Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Airlangga (Unair), dan Ditdikdasmen. Indikasi kerugian negara ditemukan juga di Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Ditdikdasmen. Lalu, ada proyek yang tidak ditemukan fisiknya di Unram. Dia menjelaskan, se-

mua temuan tadi melibatkan dana APBN Rp367 miliar. "Sedangkan telaah BAKN di tingkat pemanfaatan hasil pengadaaan ditemukan kejanggalan di tujuh PTN dan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan. Penyimpangan di tingkat ini diduga sebesar Rp88 miliar," bebernya.

Eva mengungkapkan, sebagaimana *standard operational procedure* (SOP) yang ada, BAKN akan menindaklanjuti temuan temuan ini jika dalam 15 hari kerja Komisi X DPR tidak menyatakan komitmennya untuk mempertanyakan sekaligus mengklarifikasi hal tersebut kepada Kemendiknas.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto berjanji akan segera memanggil Kemendiknas untuk mengklarifikasi temuan BAKN tersebut. Pihaknya sendiri mengaku, Komisi X secara resmi belum menerima laporan hasil telaahan BAKN tersebut.

"Kalau sudah menerima, tentu kita akan bahas. Kita akan menanyakan langsung berbagai persoalan di Kemendiknas kepada Mendiknas. Apabilananti temuan itu sudah menjurus ke hukum, kita akan

percayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau BPK untuk mengusutnya lebih lanjut," tegasnya.

Agus menyebutkan, dalam upaya mengklarifikasi masalah ini ke Kemendiknas, Komisi X DPR tentu harus melihat proporsi yang dibahas. Dia menyebutkan, Komisi X sendiri hanya memberikan pengawasan ke Kemendiknas, sehingga pihaknya tidak melakukan pengawasan langsung ke seluruh PTN di Indonesia.

Dari sisi pengawasan, Agus menjelaskan, Komisi X sebenarnya hanya mengawasi implementasi Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Dalam menindaklanjuti temuan BAKN, pihaknya bisa saja proaktif meminta hasil telaahan ke BAKN.

"Kami akan serius menanganinya. Tapi dasar pembahasan harus jelas dulu. Kalau ada laporan pasti akan ditindaklanjuti. Itu pasti. Nanti kita koordinasi dengan sekretariat komisi untuk meminta laporan BAKN," pungkasnya.

Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh mengaku belum mengetahui tentang laporan dugaan penyimpangan yang

dilansir oleh BAKN tersebut. Namun, intinya semua laporan penyimpangan anggaran berdasarkan temuan BPK ataupun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan ditindaklanjuti. "Begitu Saudara (wartawan) tanya saya dengan pertanyaan itu akan saya cek," katanya seusa Pemilihan Pendidik dan Tenaga Pendidik Berprestasi dan Berdedikasi di Jakarta kemarin.

Mantan menkominfo ini menjelaskan, secepatnya dia akan memerintahkan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenhub Haryono Umar untuk memeriksa laporan tersebut.

Universitas Sumatera Utara (USU) terkejut karena disebut oleh BAKN DPR masuk dalam 16 PTN yang penganggarnya diduga menyimpang.

"Saya terkejut dan tak tahu dari mana informasi itu. Kol dibilang USU ada praktik praktik tak sesuai prinsip hingga Rp55 miliar? Padahal semua sudah kami lakukan sesuai ketentuan pemerintah," ucair Pembantu Rektor II USU Armansyah Ginting.

● radi saputro
neneng zubaidah
suharmansyah